

**PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK
DI SURAKARTA**



ARTIKEL

Oleh:

NISTIARISA ANGELINA

K8409043

**FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

Mei 2013

**PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI SURAKARTA**

Nistiarisa Angelina

Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan *headline news* di berbagai media. Mereka dipandang oleh masyarakat telah melakukan tindak kejahatan yang mengganggu tertib sosial sehingga mereka dianggap layak diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya semakin banyak jumlah ABH yang menjalani pidana penjara dan terabaikan hak-haknya, khususnya hak pendidikan. Sebagai kota yang ditunjuk menjadi percontohan Kota Layak Anak (KLA) maka Surakarta dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan mengupayakan perlindungan bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus terpancang tunggal untuk mendiskripsikan bentuk pendidikan yang diterima oleh ABH dan peran *stakeholder* dalam upaya pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH. Data yang telah ditemukan dianalisa menggunakan teknik analisis interaktif. Kesimpulan yang diperoleh adalah pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH di Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) masih kurang mendapat perhatian dari *stakeholder*. Penting untuk membangun kesadaran berbagai pihak untuk terlibat dalam penanganan ABH demi mendukung pengembangan KLA. Penanganan ABH yang dilakukan berbasis masyarakat diharapkan dapat meminimalisir pelimpahan kasus pada aparat penegak hukum yang berakhir dengan pemenjaraan dan pengabaian hak-hak anak, khususnya di bidang pendidikan.

Kata kunci: pendidikan formal, ABH, Kota Layak Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang marak menjadi bahan perbincangan masyarakat dan *headline news* di berbagai media menunjukkan bahwa selama ini ABH dinilai telah melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat. Masyarakat cenderung menyerahkan penanganan ABH kepada aparat penegak hukum sehingga dari ratusan ribu ABH dua per tiga di antaranya berakhir dengan hukuman pidana penjara (Supeno, 2010: 70). Jumlah ABH yang

mendekam di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (Rutan) Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 324 anak (Rofiuddin, *TEMPO.com*, 23 Juli 2010). Sementara itu, berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta jumlah ABH tahun 2010 sebanyak 43 anak, tahun 2011 sebanyak 53 anak, dan 2012 sebanyak 29 anak.

ABH termasuk dalam kategori kelompok anak rentan yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan hak-hak mereka. Namun demikian masih banyak terdapat praktik pelanggaran terhadap hak-hak anak selama ia berstatus sebagai ABH maupun sesudahnya. Bentuk pengabaian atas hak-hak anak pada ABH yang paling nyata terletak pada persoalan pendidikan. Berdasarkan data hasil monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan ATMA hampir 70% ABH yang semula masih berstatus sebagai pelajar terpaksa tidak dapat menyelesaikan pendidikannya (*drop out*) (*Suara ATMA*, 2011: 3). Sekolah cenderung lepas tangan dan merasa tidak mampu lagi untuk mendidik siswa yang terlibat kasus hukum sehingga mengambil langkah mengembalikan anak pada orang tua.

Sistem pendidikan nasional seharusnya dapat menjamin pendidikan untuk semua (*education for all*), tidak terkecuali bagi ABH. Sebagai kota yang ditunjuk menjadi percontohan Kota Layak Anak (KLA) maka Surakarta dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan mengupayakan perlindungan bagi anak. Terbukanya akses pendidikan bagi semua anak, khususnya ABH adalah sebuah keharusan apabila ingin melihat anak Indonesia tumbuh dan berkembang sebagaimana terobsesikan dalam Konvensi Hak Anak (Supeno, 2010: 229).

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dapat diakses oleh anak pada saat masih berstatus sebagai ABH? 2) Bagaimana bentuk pemenuhan kebutuhan pendidikan formal yang diterima anak setelah ia tidak berstatus sebagai ABH? 3) Bagaimana peran *stakeholder* (pemerintah kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat

pemerhati anak) dalam mengupayakan pemenuhan hak kebutuhan pendidikan formal bagi ABH?

REVIEW LITERATUR

Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Layak Anak (KLA)

Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sendiri bermula dari adanya konsep mengenai anak nakal sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Istilah ABH baru muncul ketika perspektif hak anak mulai banyak dipahami yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak nakal selanjutnya disebut sebagai ABH. Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Penelitian ini difokuskan pada ABH sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ABH yang dimaksud dalam penelitian adalah ABH adalah anak yang secara sengaja maupun tidak, harus berurusan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi ataupun pelaku (berkonflik) dengan hukum.

Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, ABH termasuk dalam salah satu kelompok Anak dalam Situasi Khusus yang membutuhkan penanganan secara khusus. Seorang anak dapat masuk dalam kelompok rentan akibat tidak adanya kepedulian dari orang dewasa di sekitarnya yang memperhatikan hak-hak mereka. Dalam hal ini negara dibebani kewajiban untuk melakukan intervensi lebih dan tindakan yang berbeda demi mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak, terlebih pada anak-anak berada pada situasi dan kondisi kelompok rentan (Yayasan Pemantau Hak Anak, 2010: 2-3).

Secara spesifik hak-hak dasar anak dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan berpartisipasi. Pandangan dan pemikiran tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak menuntut agar orang dewasa (orang tua biologis, pemerintah, masyarakat) bertanggung jawab penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan oleh siapa pun dan di belahan bumi mana pun (Supeno, 2010: 27).

Perlindungan bagi ABH dilakukan dengan mengupayakan penahanan sebagai jalan akhir. Jika proses hukum terus berjalan maka perlindungan terhadap mereka dapat dilakukan berbasis masyarakat atau dalam istilah hukum disebut *diversi* dan keadilan restoratif atau *Retorative Justice* (RJ). Tujuannya untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dengan membuat kesepakatan melalui komunikasi terbuka antara ABH dan korban serta keluarga masing-masing yang melibatkan para ahli, masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, serta penanganan kasus anak tersebut harus merupakan bagian dari program pencegahan anak menjadi ABH (Marlina, 2012: 18-19). Diharapkan regulasi dan kebijakan perlindungan ABH dengan mengintegrasikan perspektif anak dapat meminimalisir praktik pelanggaran terhadap hak-hak ABH, khususnya di bidang pendidikan.

Pada kasus ABH, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang rentan terabaikan apalagi jumlah ABH dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Oleh sebab itu di tahun 2012 kepedulian tentang hak pendidikan bagi ABH semakin ditingkatkan. Orang tua dan masyarakat berkewajiban menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif sebagai bagian dari program pencegahan anak menjadi ABH (Marlina, 2012: 18-19). Pemerintah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin setiap ABH berhak mendapatkan pendidikan. Dalam rangka implementasi pengembangan Kota Layak Anak (KLA) pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak di bidang

pendidikan dalam Pasal 13 b bahwa, “Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlasungan pendidikan anak”.

Namun demikian, sejumlah besar ABH terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan. Pendidikan nonformal dapat dijadikan solusi tepat untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan ABH. Pendidikan nonformal dapat berfungsi menggantikan pendidikan formal melalui pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C). Pendidikan nonformal bagi ABH juga berfungsi memberikan ketrampilan melalui kursus dan pelatihan yang berguna sebagai bekal mencari lapangan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus terpancang tunggal untuk mendiskripsikan bentuk pendidikan yang diterima oleh ABH dan peran *stakeholder* dalam upaya pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH di Surakarta sebagai KLA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan studi dokumentasi. Peneliti mengambil cuplikan dengan *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu Bagian Perlindungan Anak di Bapermas PP, PA, dan KB, Dinas Pendidikan, Yayasan ATMA serta Balai Pemasarakatan (Bapas). Peneliti mengambil cuplikan dengan *snowball sampling* untuk menentukan informan ABH dan keluarganya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Yayasan ATMA. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) agar peneliti memperoleh gambaran bentuk pendidikan yang

diterima oleh ABH dan peran *stakeholder* dalam upaya pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH.

2. Observasi

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini *Anecdotal record* tipe deskripsi umum untuk mencatat perilaku yang khas, unik dan penting dari informan (Herdiansyah, 2010: 133).

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengkaji dokumentasi berupa data statistik terkait ABH dari berbagai instansi.

Peneliti menggunakan model analisis data interaktif Miles & Huberman untuk menganalisis data temuan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian diproses melalui pencatatan, penyuntingan dan disusun dalam bentuk narasi (Haryono, 2008: 61). Data yang tidak valid dan tidak dibutuhkan disaring untuk mempermudah *display data* dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dipilih dan disaring dikategorikan berdasarkan permasalahan penelitian. Peneliti selanjutnya menarik kesimpulan akhir berdasarkan data yang telah ditampilkan sesuai dengan rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut data dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan cukup banyaknya permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk ABH dari Bapas. Pada tahun 2010 permintaan Litmas kepada Bapas sebagai salah satu pelengkap untuk keperluan persidangan mencapai 43 anak. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2011, yaitu berjumlah 53 anak, sedangkan pada tahun 2012 hingga bulan November jumlah Litmas ABH sebanyak 23 anak dengan jenis kelamin laki-laki. Data lain berdasarkan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan ATMA pada tahun 2012 jumlah ABH

mencapai 51 anak. Semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan sebagian besar kasus pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan sejumlah karakteristik dan penyebab seorang anak dapat melakukan tindakan pidana sehingga mereka berstatus sebagai ABH, diantaranya faktor ekonomi keluarga yang erat kaitannya dengan kasus pencurian, faktor perkembangan kemajuan teknologi informasi yang erat kaitannya dengan kasus persetubuhan dan pemerkosaan, serta faktor lingkungan.

Bentuk Pendidikan yang Dapat Diakses oleh Anak pada Saat Masih Berstatus sebagai ABH

Bentuk pendidikan yang dapat diakses oleh anak pada saat masih berstatus sebagai ABH meliputi pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal.

1. Pendidikan informal yang diterima ABH sangat bergantung pada kondisi keluarga dan lingkungan sosial di sekitar anak. Keluarga yang tidak harmonis menyebabkan kedekatan anak dengan orang tua menjadi berkurang sehingga dapat memicu terjadinya sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya anak rentan terpengaruh melakukan tindakan melanggar norma, baik akibat pengaruh teman sebaya maupun orang dewasa di sekitarnya.
2. Pendidikan formal yang diterima oleh ABH dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:
 - a. ABH yang sedang menjalani proses pidana pemeriksaan, penyidikan dan pengadilan, baik yang ditahan maupun tidak dapat mengakses pendidikan formal jika kasus hukumnya tidak diketahui pihak sekolah atau sekolah telah memiliki perspektif hak anak.
 - b. ABH yang berdasarkan putusan hakim menjalani pidana (anak pidana) atau diserahkan pada negara untuk dididik (anak negara) atau yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik (anak

sipil) di Rutan mendapat layanan pendidikan formal berupa pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

- c. ABH sebagai anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat dapat mengakses pendidikan formal dengan pindah ke sekolah yang telah memiliki perspektif hak anak.
 - d. ABH sebagai anak negara yang pembinaannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dapat mengakses pendidikan formal jika kasus hukumnya tidak diketahui pihak sekolah atau sekolah telah memiliki perspektif hak anak.
3. Pendidikan non formal yang diterima ABH di Rutan berupa pendidikan rohani, sedangkan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja dari Bapas diterima oleh ABH yang sudah memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat.

Bentuk Pendidikan Formal yang Diterima Anak Setelah Tidak Berstatus sebagai ABH

Berdasarkan berbagai kasus yang dialami ABH ketika kasus mencuat ke permukaan mayoritas dari ABH akan mendapatkan penolakan oleh pihak sekolah. Mereka dianggap sebagai contoh yang buruk bagi teman-temannya dan dinilai telah mencemarkan nama baik sekolah. Akibatnya ABH harus pindah ke sekolah dengan *grade* yang lebih rendah atau di luar kota. Jika diterima di sekolah yang baru pun mereka juga masih harus menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai penggantinya, anak dapat mengikuti pendidikan non formal, yaitu pendidikan kesetaraan berupa Kejar Paket.

Peran *Stakeholder* (Pemerintah Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak) dalam Mengupayakan Pemenuhan Hak Kebutuhan Pendidikan Formal bagi ABH

Penanganan ABH pada masyarakat modern terspesialisasi pada instansi terkait dengan tanggung jawab yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Kepolisian berperan dalam proses penyidikan, Bapas berperan dalam membuat

Litmas, Bapermas PP, PA, dan KB berperan melakukan pendampingan dan perlindungan bagi anak sebagai koordinator Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PT PAS), Kejaksaan dan Pengadilan berperan dalam mengambil putusan hukum akhir bagi anak, dan Lapas Anak memberikan pendidikan kemasyarakatan bagi anak jika terpaksa ia harus menjalani pidana penjara.

Semenjak istilah anak nakal selanjutnya diakomodir menjadi ABH, penanganan ABH diupayakan dapat dilakukan di tingkat masyarakat dengan membuat kesepakatan antara pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan keduanya. Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, penyebab anak menjadi ABH adalah akibat dari ketidakberdayaan ekonomi keluarga, kemajuan teknologi informasi dan faktor lingkungan di sekitar anak yang tidak diimbangi oleh kemampuan untuk pengawasan dan pengendalian sosial dari orang dewasa di sekitar anak. Namun demikian, spesialisasi kerja belum terkoordinasi dengan baik.

Pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH di Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) masih kurang mendapat perhatian dari *stakeholder*. Pemenuhan hak pendidikan formal dominan dilakukan oleh LSM Pemerhati Anak melalui jejaring kerja PT PAS. Peran *stakeholder* dalam penanganan ABH di KLA sebagian besar menghasilkan putusan akhir pidana penjara yang menyebabkan pengabaian hak-hak anak, khususnya di bidang pendidikan.

PENUTUP

Pemenuhan hak pendidikan formal bagi ABH di Surakarta yang tengah mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) masih terhalang oleh berbagai permasalahan, diantaranya lemahnya ketahanan keluarga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan ABH, dan belum meratanya perspektif hak anak pada *stakeholder*. Penting untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk terlibat dalam penanganan ABH, antara lain melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) penanganan ABH di Tingkat Kelurahan oleh masyarakat dan pelaksanaan *Restorative*

Justice (RJ) oleh *stakeholder* untuk mendukung pengembangan KLA. Dengan demikian pemenjaraan anak dapat diminimalisir dan hak anak, khususnya di bidang pendidikan tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki Haryono. (2008). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS.
- Haris Herdiansyah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: Refika Aditama.
- Mempertanyakan Hak Pendidikan ABH di Kota Layak Anak*. (2011, September). Suara ATMA, 2-3.
- Rofiuddin. (2010. 23 Juli). Di Jawa Tengah, 324 Anak Mendekam di Penjara. *TEMPO.com*. Diperoleh 2 Agustus 2012, dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/23/177265756/Di-Jawa-Tengah-324-Anak-Mendekam-di-Penjara>.
- Hadi Supeno. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Yayasan Pemantau Hak Anak. (2010, 22 Juni). Praktek-Praktek Diskriminasi terhadap Manusia Diawali dari Anak-Anak. *Yayasan Pemantau Hak Anak*. Diperoleh 15 Januari 2013, dari <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-Praktek-Diskriminasi-terhadap-Manusia-Diawali-dari-Anak-Anak1.doc>.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.